

LAPORAN PENELITIAN



UJI ADAPTASI MODEL PEMBERDAYAAN INKLUSIF KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI ARABIKA DI KABUPATEN DAIRI

Disusun oleh:

Ir. Yuliana Kansrini, M.Si. Ketua Tim
Puji Wahyu Mulyani, S.P., M.Sc. Anggota

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

UJI ADAPTASI MODEL PEMBERDAYAAN INKLUSIF KELEMBAGAAN PETANI DALAM Mendukung PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI ARABIKA DI KABUPATEN DAIRI

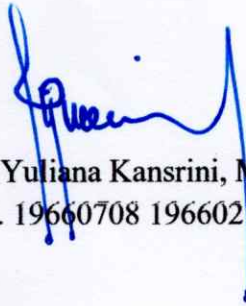
Bidang Penelitian : Penyuluhan/ Pemberdayaan Petani Milenial
Peneliti :
Nama Lengkap : Ir. Yuliana Kansrini, M.Si.
a. NIDN : 4408076701
b. NIP : 19660708 199602 2 001
c. Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Penyuluhan Perkebunan Presisi
f. Nomor HP : 0812 6044 167
g. Alamat *e-mail* : yulianakansrini@gmail.com
Anggota Peneliti :
a. Nama Lengkap : Puji Wahyu Mulyani, S.P., M.Sc.
b. NIP : 19860110 201902 2001
c. Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
Jumlah Pendanaan : Rp. 33.860.000,-
Sumber Pendanaan : DIPA Polbangtan Medan
Sumber Pendanaan lainnya : -
Lama Penelitian : 9 Bulan

LEMBAR PERSETUJUAN REVIEWER

**UJI ADAPTASI MODEL PEMBERDAYAAN INKLUSIF
KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI ARABIKA
DI KABUPATEN DAIRI**

Medan, Desember 2023

Tim Peneliti



Ir. Yuliana Kansrini, M.Si.
NIP. 19660708 196602 2 001

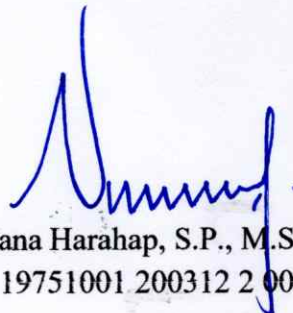


Puji Wahyu Mulyani, S.P., M.Sc.
NIP. 19860110 201902 2 001

Menyetujui,
Tim *Reviewer*,



Dr. Dwi Febrimeli, S.P., M.Sc.
NIP. 19720207 200312 2 001



Nurliana Harahap, S.P., M.Si.
NIP. 19751001 200312 2 001

Medan, Desember 2023

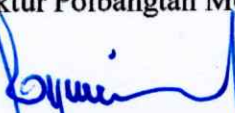
Mengetahui,
Kepala UPPM



Dr. Firman R.L. Silalahi, S.TP., M.Si.
NIP. 19731230 200312 1 001

Menyetujui,

Direktur Polbangtan Medan



Ir. Yuliana Kansrini, M.Si.
NIP. 19660708 196602 2 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kelembagaan petani dalam mendukung agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek analisis dalam penelitian ini adalah petani, pengurus kelompok tani, pelaku usaha kopi arabika, Pengelola BUMDes, Pengurus Kelembagaan Petani Maspigass, Koperasi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Dairi. Hasil penelitian diketahui bahwa Kondisi kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi dapat diklasifikasikan dalam empat aspek, yaitu: (1) sumber daya manusia (SDM) petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (2) budidaya tanaman kopi arabika di Kabupaten Dairi, (3) kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (4) ekosistem dalam pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi.

Aspek sumber daya manusia (SDM) dimana petani kopi arabika mayoritas belum memiliki kemampuan budidaya tanaman yang baik (*Good Agriculture Practices*) dan penanganan pascapanen yang baik (*Good Handling Practices*). Namun terdapat para tokoh petani lokal yang telah berhasil (*local champion*) yang dapat berperan untuk membantu proses peningkatan kapasitas SDM petani kopi arabika di Kabupaten Dairi. Aspek budidaya tanaman yang baik yang dilakukan oleh petani mayoritas belum sesuai anjuran GAP. Hal ini disebabkan karena pola pikir (*mindset*) pemahaman yang keliru tentang GAP kopi arabika. Aspek kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi masih bergerak sebagian kecil yang dapat mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang (LMPIG KASS) belum berjalan sesuai fungsinya dalam memberikan edukasi, pengolahan dan pengawasan serta pemasaran kopi arabika petani di Kabupaten Dairi. Aspek ekosistem agribisnis kopi arabika sudah mulai terbentuk dan berperan dari masing-masing subsistem agribisnis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dairi.

Kata Kunci: Kelembagaan Petani, Kopi Arabika, Kabupaten Dairi

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the institutional condition of farmers in supporting arabica coffee agribusiness in Dairi Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The subjects of analysis in this study are farmers, administrators of farmer groups, arabica coffee business actors, BUMDes managers, Maspigass Farmer Institutional Administrators, Cooperatives, Agriculture, Food Security, and Fisheries Office of Dairi Regency. The results of the study are known that the institutional condition of arabica coffee farmers in Dairi Regency can be classified into four aspects, namely: (1) human resources (HR) arabica coffee farmers in Dairi Regency, (2) cultivation of arabica coffee plants in Dairi Regency, (3) arabica coffee farmers institutions in Dairi Regency, (4) ecosystems in the development of arabica coffee agribusiness in Dairi Regency.

Human resource aspects (HR) where the majority of arabica coffee farmers do not have good plant cultivation skills (Good Agriculture Practices) and good post-harvest handling (Good Handling Practices). However, there are local champions who can play a role in helping the process of increasing the human resource capacity of arabica coffee farmers in Dairi Regency. The aspects of good crop cultivation carried out by the majority of farmers have not been as recommended by GAP. This is due to the mindset of a wrong understanding of GAP arabica coffee. The institutional aspect of arabica coffee farmers in Dairi Regency is still moving a small part that can support the development of arabica coffee agribusiness in Dairi Regency. The Sumatra Sidikalang Arabica Coffee Geographical Indication Protection Society (LMPiG KASS) has not been running according to its function in providing education, processing and supervision and marketing of Arabica coffee farmers in Dairi Regency. Aspects of the arabica coffee agribusiness ecosystem have begun to form and play a role in each agribusiness subsystem in accordance with the vision and mission of Dairi Regency.

Keyword: Farmer Institution, Arabic Coffee, Dairi Regency

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih sayang dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian Polbangtan Tahun 2023. Laporan Akhir penelitian yang berjudul; “Uji Adaptasi Model Pemberdayaan Inklusif Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Di Kabupaten Dairi” merupakan salah satu Penelitian Dosen Polbangtan medan Tahun 2023. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, tim peneliti melaporkan sesuai dengan kondisi dan hasil yang diperoleh di lapangan yakni mengidentifikasi dan menganalisis tentang kondisi kelembagaan petani dalam mendukung agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktur Polbangtan Medan dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Polbangtan Medan atas dukungan pendanaan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tim Reviewer (Dr. Dwi Febrimeli, S.P., M.Sc. dan Dr. Nurliana Harahap, S.P., M.Si.) yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan laporan akhir penelitian. Selanjutnya, terima kasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi beserta jajarannya yang telah banyak memberikan dukungan dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Semangat dan tetap terus berjuang kepada para pelaku usaha kopi arabika di Kabupaten Dairi selaku informan kunci untuk dapat memperkuat posisi tawar dalam mencapai kesejahteraan bagi pelaku usaha kopi arabika mulai dari petani produsen hingga pelaku usaha industri produk olahan kopi arabika di Kabupaten Dairi.

Semoga hasil penelitian yang tertuang dalam laporan akhir penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan terutama terkait kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani. Penulis menyadari penyusunan laporan akhir penelitian ini masih belum sempurna dan perlu dilakukan berbagai kajian dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan data dalam penyusunan laporan akhir penelitian ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kekeliruan, dan terima kasih atas segala bentuk dukungannya.

Medan, Desember 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN REVIEWER	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN	iii
ABSTRAK/ ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	11
B. Dasar Pertimbangan	16
C. Tujuan	16
D. Keluaran	16
E. Manfaat	17
F. Dampak	17
G. Logical Framework	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	19
B. Penelitian Terdahulu (<i>State of The Arts</i>)	23
C. Kerangka Pemikiran Penelitian	26
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Dasar Penelitian	27
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	27
D. Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAIRI	29
V. ANALISIS KONDISI KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG AGRIBISNIS KOPI ARABIKA DI KABUPATEN DAIRI	40
VI. PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Tanaman dan Produksi Kopi Arabika Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota Penghasil Kopi di Provinsi Sumatera Utara	2
Tabel 2.	Jenis komoditas, Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Jumlah KK Petani di Kabupaten Dairi Tahun 2021	4
Tabel 3.	Luas Areal, Produksi dan KK Petani Kopi Arabika Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan Tahun 2021	5
Tabel 4.	Matriks <i>Logical Framework</i> / Kerangka Kerja Logis	10
Tabel 5.	Matriks Tinjauan Penelitian Terdahulu (<i>State of The Arts</i>)	16
Tabel 6.	Letak Geografis, Luas dan Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Per Kecamatan	27
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelompok Umur	29
Tabel 9.	Luas Tanam dan Jumlah Produksi Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Dairi	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	18
Gambar 2.	Peta Kabupaten Dairi	25
Gambar 3.	Peta Administrasi Kabupaten Dairi	26
Gambar 4.	Grafik Capaian Pertambahan Luas Kopi Arabika di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022	34
Gambar 5.	Struktur Organisasi LMPIG KASS	37
Gambar 6.	Logo LMPIG KASS	38
Gambar 7.	Strategi Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan	47
Gambar 8.	Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani	49

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan kopi memberikan kontribusi besar bagi perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia, salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kopi arabika cocok ditanam di Sumatera Utara yang memiliki banyak wilayah pegunungan dengan ketinggian 600-2.000 meter dari permukaan laut dan dingin. Kopi arabika juga memerlukan iklim dan kelembaban, tanah yang subur, dan sinar matahari yang cukup.

Sumatera Utara sebagai produsen terbesar keempat dari seluruh Indonesia pada Tahun 2019 dengan luas areal tanam yakni 71.955 hektare dan produksi kopi arabika mencapai 77.765 ton/ tahun. Sebaran wilayah produsen kopi arabika di Sumatera Utara antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan (disbun.sumutprov.go.id, 2019). Secara rinci luas lahan dan produksi kopi arabika per kabupaten disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Luas Tanaman dan Produksi Kopi Arabika Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota Penghasil Kopi di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten Kota	Luas Tanaman dan Produksi Kopi Arabika					
		Luas Tanaman (Ha)			Produksi (Ton)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Mandailing Natal	3.554	3.554	3.564	2.332	2.332.00	2.533
2	Tapanuli Selatan	4.608	4.608	4.606	2.098	2.098.00	2.103
3	Tapanuli Utara	16.467	16.467	16.468	15.213	15.213.00	15.220
4	Toba Samosir	4.784	4.784	4.788	4.187	4.187.00	4.403
5	Simalungun	8.217	8.217	8.233	10.324	10.324.00	10.523
6	Dairi	12.088	12.088	12.099	9.612	9.612.00	9.613
7	Karo	9.198	9.198	9.205	7.402	7.402.00	7.403
8	Deli Serdang	713	713	711	666	666.00	663
9	Langkat	75	75	75	78	78.00	78
10	Humbang Hasundutan	12.044	12.044	12.057	9.677	9.677.00	9.683
11	Pakpak Bharat	959	959	964	1.085	1.085.00	1.084
12	Samosir	5.058	5.058	5.064	4.157	4.157.00	4.163
Total Sumatera Utara		77.765	77.765	77.834	66.831	66.831	67.469

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (2021)

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diketahui bahwa Kabupaten Dairi merupakan kabupaten penghasil kopi terbesar ketiga di Sumatera Utara, setelah Kabupaten Tapanuli Utara dan

Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini, untuk kopi arabika Kabupaten Dairi belum memiliki sertifikat indikasi geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sertifikat indikasi geografis menjadi penting terutama dalam mendukung mutu produk dan pemasaran secara luas skala nasional dan internasional. Mengingat, sertifikat indikasi geografis menjadi salah satu persyaratan ekspor komoditas pertanian.

Selain itu, manfaat perlindungan Indikasi Geografis antara lain: (1) memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis; (2) menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis; (3) menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen; (4) membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk; (5) meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik; (6) reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata (<https://www.dgip.go.id>). Dengan adanya sertifikat indikasi geografis komoditas kopi arabika dari Kabupaten Dairi, maka produk kopi arabika yang dihasilkan oleh petani dapat dipasarkan secara luas hingga pasar internasional.

Kopi Arabika Sidikalang mempunyai kualitas baik, reputasi, karakteristik dan tumbuh subur di Kabupaten Dairi sehingga cocok didaftarkan memperoleh indikasi geografis. Pemerintah Kabupaten Dairi dalam upaya mengembalikan kejayaan Kopi Sidikalang, berupaya menjalin kerja sama dengan komunitas masyarakat untuk mempersiapkan indikasi geografis untuk Kopi Arabika Sidikalang (sumut.antaranews.com, 2022). Upaya tersebut tentu diharapkan dapat meningkatkan gairah petani kopi arabika untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan kebun kopinya. Mengingat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Dairi adalah bertani kopi. Hal ini didukung oleh data BPS Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Jenis komoditas, Luas Areal, Jumlah Produksi, dan Jumlah KK Petani di Kabupaten Dairi Tahun 2021

No.	Komoditas	Luas Areal	Produksi		Jumlah Petani (KK)
		(Ha)	(Ton)	(Kg/Ha/Thn)	
1	Aren	174,37	82,4	614,467	635
2	Gambir	181	78,58	628,64	257
3	Kakao	2.075,70	1.319,08	803,974	3.842
4	Karet	504	159	519,608	385
5	Kelapa	774	508,83	723,078	1.264
6	Kelapa Sawit	745,7	MS 2.580,35 TBS 11.728,864 IS 351,866	MS 4.806,911 TBS 21.849,597 IS 655,488	423
7	Kemenyan	141	38,3	472,84	346
8	Kemiri	1.179,92	1.788,70	1.669,62	5.336
9	Kopi Arabika	13.595,80	13.025,47	1.129,45	19.000
10	Kopi Robusta	6.993,40	3.880,50	752,122	7.200
11	Kulit Manis	179,1	205,06	1.280,82	867
12	Pinang	243,83	116,94	763,815	825
13	Vanili	61	13,42	220	120
Jumlah		26.848,82	23.796,63	1.098,40	40.500

Sumber: <http://disbun.sumutprov.go.id/>

Tabel 2 menjelaskan bahwa komoditi kopi arabika terdapat seluas 13.595,80 Ha dengan produksi 1.129,45Ton/ Ha yang dikelola oleh petani yang berjumlah sebanyak 19.000 KK. Hal ini menegaskan bahwa mayoritas petani mengelola jenis komoditi kopi arabika. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Tahun 2020, luas lahan dan produksi tanaman kopi arabika masing-masing kecamatan di Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Luas Areal, Produksi dan KK Petani Kopi Arabika Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	KK Petani
		TBM	TM	TTM	Jumlah			
1	Sidikalang	284	855	45,25	1.184,25	854,22	999,09	2.233
2	Sumbul	401	6.513,50	379	7.293,50	7.816	1.199,97	8.537
3	Siempat Nempu	0	81	24	105	71,38	881,23	95
4	Silima Pungga Pungga	0	59	0	59	31,43	532,71	78
5	Siempat Nempu Hulu	34	228	25	287	205,2	900	704
6	Pegagan Hilir	54	204,1	71,45	329,55	204,1	1.000	1.240
7	Parbuluan	290	2.843	243,5	3.376,50	3.127	1.099,89	4.455
8	Lae Parira	0	110	35	145	105,71	961	210
9	Berampu	15	264,5	46	325,5	238,05	900	160
10	Silahasabungan	0	5,5	2	7,5	3,38	614,55	30
11	Sitinjo	52	369	62	483	369	1.000	1.258
Jumlah		1.130	11.532,60	933,2	13.595,80	13.025,47	1.129,45	19.000

Sumber: <http://disbun.sumutprov.go.id/>

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang termasuk memiliki jumlah produksi tertinggi antara lain adalah: (1) Kecamatan Sumbul dengan luas areal tanam 7.293,50 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.199,97 Kg/Ha/Tahun serta sebanyak 8.537 KK Petani, (2) Kecamatan Parbuluan dengan luas areal tanam 3.376,50Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.099,89 Kg/Ha/Tahun serta sebanyak 4.455 KK Petani, (3) Kecamatan Sidikalang dengan luas areal tanam 1.184,25 Ha dengan jumlah produksi sebesar 999,09 Kg/Ha/Tahun serta sebanyak 2.233 KK Petani.

Dalam pengelolaan usaha kebun kopi arabika, petani mengalami beberapa permasalahan seperti adanya perubahan iklim (*climate change*) yang berdampak pada ketidakpastian cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan munculnya serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi arabika. Beberapa serangan hama yang terjadi adalah hama penggerek buah kopi (PBKo) yakni (*Hypothenemus hampei*) yang dapat berakibat menimbulkan lubang-lubang pada biji kopi dan membuat mutu biji menjadi rendah. Akibatnya, harga jual biji kopi arabika juga rendah.

Selanjutnya, terkait kelembagaan petani saat ini belum adanya pengorganisasian petani kopi arabika yang menjadi wadah pembelajaran bersama serta menjadi kekuatan bersama untuk memperoleh peluang dalam pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Petani

kopi yang tergabung dalam kelompok tani juga memiliki focus usaha tani pada tanaman hortikultura. Untuk memotivasi petani agar dapat mengoptimalkan pengelolaan tanaman kopi arabika, diperlukan adanya kelembagaan petani kopi arabika yang dapat menjadi wadah pembelajaran secara partisipatif dan berkelanjutan.

Hal inilah yang perlu disikapi secara serius agar produksi kopi arabika di Kabupaten Dairi dapat terus meningkat dan berkelanjutan. Dengan masih rendahnya produktivitas kopi arabika tersebut, dan diperlukan pemberdayaan petani kopi arabika sebagai upaya peningkatan produksi kopi arabika secara berkelanjutan untuk mendukung ekspor kopi arabika. Kelembagaan petani merupakan wadah pembelajaran petani, fungsi produksi dan pemasaran produk pertanian secara kolektif. Keberadaan kelembagaan petani menjadi basis dalam gerakan petani untuk memperkuat posisi tawarnya dalam ekosistem agribisnis. Untuk itu, perlu dikaji bagaimana kondisi kelembagaan petani dalam mendukung agribisnis kopi arabika Kabupaten Dairi.

B. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan penelitian ini antara lain adalah:

1. Komoditas kopi arabika merupakan salah satu komoditi strategis perkebunan dikembangkan dalam mendukung Gerakan Ekspor Kementerian Pertanian.
2. Kabupaten Dairi menjadi mitra Kerjasama Polbangtan Medan dalam melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yakni khususnya kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pemberdayaan Kelembagaan Petani menjadi isu strategis dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian

C. Tujuan Pelaksanaan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kelembagaan petani dalam mendukung agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kelembagaan petani dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi;
2. Menganalisis aspek kelembagaan petani dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi

D. Keluaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran/*output* sebagai berikut:

1. Adanya hasil analisis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabika di Kabupaten Dairi.
2. Adanya model pemberdayaan inklusif kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabika di Kabupaten Dairi.
3. Publikasi Jurnal Nasional dan Internasional, HaKI serta bahan ajar pada Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi dan institusi Polbangtan Medan; bahan kajian pembelajaran bagi peneliti dan akademisi untuk mengetahui model pemberdayaan inklusif, partisipasi, tingkat keberdayaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.
2. Lembaga penelitian; sebagai informasi untuk melakukan penelitian terkait uji adaptasi model pemberdayaan inklusif sebagai inovasi sosial di bidang pertanian.
3. Pelaku usaha tani kopi arabika, sebagai informasi dan masukan dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika
4. Pengambil kebijakan; sebagai bahan masukan dalam merancang program pemberdayaan petani yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.

F. Dampak

Dampak yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya model pemberdayaan kelembagaan petani dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi.
2. Adanya komitmen kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dalam pemberdayaan kelembagaan petani dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi.
3. Diadopsi dan diterapkannya model pemberdayaan inklusif kelembagaan petani dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi.

G. Logical Framework/ Kerangka Kerja Logis

Kerangka kerja logis yang disusun dalam penelitian ini, secara rinci dijelaskan pada Tabel

Tabel 4. Uji Adaptasi Model Pemberdayaan Inklusif Kelembagaan Petani Kopi Arabika Untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Di Kabupaten Dairi

<i>Narrative Summary</i>	<i>Performance Indicators</i>	<i>Monitoring dan Evaluation</i>	<i>Assumption</i>
<p>Sasaran (Goal): 1. Terbentuknya model pemberdayaan kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabikadi Kabupaten Dairi</p>	<p>1. Nilai tambah peningkatan kesadaran, akses, partisipasi, dan kontrol oleh petani terhadap tata kelola kelembagaan petani</p>	<p>Studi dampak yang bersifat “independent”</p>	<p>1. Adanya dukungan dari <i>multistakeholders</i> dalam merumuskan pola komunikasi model pemberdayaan kelembagaan petani kopi 2. Adanya partisipasi petani dalam proses model pemberdayaan kelembagaan petani kopi</p>
<p>Manfaat (Outcomes) Diadopsi dan diterapkannya model pemberdayaan kelembagaan petani kopi dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabika di Kabupaten Dairi</p>	<p>1. Meningkatnya partisipasi petani dalam uji adaptasi model pemberdayaan kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi 2. Meningkatnya keberdayaan petani kopi arabika melalui kelembagaan di Kabupaten Dairi</p>	<p>3. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan kelembagaan ekonomi petani 4. Laporan hasil pengukuran perilaku komunikasi petani</p>	<p>1. Adanya dukungan dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat 2. Adanya sosial budaya masyarakat lokal</p>
<p>Hasil (Output) 1. Tersusunnya <i>hasil</i> model pemberdayaan kelembagaan petani kopi dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabika di Kabupaten Dairi</p>	<p>1. Meningkatnya partisipasi petani kopi dalam menyusun rencana kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabikadi Kabupaten Dairi 2. Adanya rumusan model pemberdayaan kelembagaan petani dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi arabikadi Kabupaten Dairi</p>	<p>1. Dokumen rencana kegiatan kelembagaan petani kopi 2. Laporan penelitian</p>	<p>1. Adanya pemahaman bersama dalam mendukung kelembagaan petani kopi 2. Adanya komitmen dalam mengelola kelembagaan petani kopi 3. <i>Political will</i> pemangku kebijakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian</p>

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari istilah *empower* yang dimaknai memberikan kekuasaan, kekuatan menuju keberdayaan. Menurut Jim Ife (2013 dalam Febrimeli dkk, 2021), pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Hal ini dimaknai sebagai upaya dalam pergeseran paradigma pembangunan nasional yang berubah dari sebelumnya pembangunan yang berorientasi ekonomi (*economic centered development*) menjadi pembangunan yang berorientasi sumberdaya manusia (*people centered development*).

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014 dalam Febrimeli dkk, 2021). Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya memberikan penguatan kapasitas masyarakat agar memiliki kesadaran individu dan kesadaran kolektif, memberikan akses informasi, dan kesempatan berpartisipasi, serta mampu mengontrol keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari yang kurang beruntung atau marjinal agar dapat memiliki kekuasaan antara lain: (1) kekuasaan atas pilihan pribadi dan peluang hidup, (2) kekuasaan untuk mempertahankan Hak Azasi Manusia (HAM), (3) kekuasaan dalam mendefinisikan kebutuhan mereka, (4) kekuasaan atas gagasan, (5) kekuasaan atas kelembagaan, (6) kekuasaan atas sumberdaya, (7) kekuasaan atas kegiatan ekonomi, dan (8) kekuasaan atas reproduksi. Dengan demikian, masyarakat harus mampu menetapkan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana memenuhinya, dengan cara menghargai pengetahuan lokal, kebudayaan lokal, sumberdaya lokal, keterampilan lokal, dan menghargai proses lokal yang terjadi (Apsari, dkk., 2017).

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah

direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur melalui (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, (b) perencanaan program, (c) melaksanakan program, serta (d) keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Prinsip pemberdayaan masyarakat terdiri dari: (1) kesetaraan, (2) partisipasi, (3) keswadayaan masyarakat, (4) keberlanjutan (Widjajanti, 2011 dalam Febrimeli dkk, 2021).

Model Pemberdayaan inklusif merupakan suatu konsep pemberdayaan dengan pendekatan secara inklusif kepada kelompok sasaran atau penerima manfaat. Hasil penelitian Febrimeli, dkk. (2021) mengemukakan bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang inklusif sesuai dengan kondisi dan situasi dari kelompok sasaran pemberdayaan. Terdapat empat poin kunci dalam merancang desain model pemberdayaan secara inklusif, antara lain adalah: (1) *smart*, dengan cara proses pembangunan menggunakan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan; (2) *agile*, dapat dengan tangkas dan cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan petani; (3) *innovative*, dimana inovasi yang diperkenalkan adalah berasal dari proses pembelajaran bersama dengan menghargai pengetahuan lokal petani; dan (4) *inclusive*, dapat meningkatkan kapasitas lokal petani setempat sesuai dengan sosial budaya masyarakat.

Selanjutnya, keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus-menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017). Keberdayaan petani kopi arabika dalam penelitian ini meliputi beberapa variabel yaitu: kemampuan dalam pengadaan sarana produksi, kemampuan dalam proses produksi, kemampuan dalam pemasaran, kemampuan dalam meningkatkan produktivitas, kemampuan menjalin kerjasama dengan lembaga agribisnis, dan keberlanjutan usahatani.

2. Konsep Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika

Pengembangan konsep agribisnis kopi merupakan alternatif solusi yang tepat dalam pembangunan perdesaan tanpa melupakan pembangunan perkotaan. Melalui pengembangan kawasan agribisnis kopi diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan dengan wilayah produksi pertanian. Menurut Saragih (2018) beberapa prinsip pembangunan melalui pengembangan paradigma agribisnis adalah: (1) paradigma agribisnis merupakan suatu model

yang mencakup sistem kegiatan pra dan budidaya, panen, pascapanen dan pemasaranserta sektor penunjangnya sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi kuat satu dan tak terpisahkan; (2) berorientasi pasar (*market oriented*), yaitu menempatkan pendekatan *supply-demand* sebagai pertimbangan utama dan pemerintah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses produksi dan distribusi untuk mengatasi kegagalan pasar yang bisa merugikan produsen (petani) maupun konsumen (baik industri maupun rumah tangga); (3) menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*), yaitu dengan memperhitungkan kesinambungan *supply, demand*, dan daya dukung lingkungan untuk produksi jangka panjang; (4) keterkaitan sistem produksi dengan pendukung yang efisien seperti: (a) penyediaan input produksi (lahan, air, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja), (b) perbankan dan asuransi, (c) industri pengolahan, (d) penelitian (pengembangan teknologi) untuk meningkatkan nilai tambah), (e) transportasi (jalan, pelabuhan, angkutan).

Pengembangan kawasan agribisnis berbasis komoditas unggulan menjadi eksplorasi strategis untuk mengembangkan kawasan agribisnis berbasis komoditas unggulan antara lain: (a) Peningkatan kemandirian masyarakat (tokoh petani, tokoh masyarakat dan LSM) dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian; (b) Penguatan kapasitas kelembagaan tani yang mengarah pada pengembangan koperasi atau asosiasi atau bentuk lain yang cocok dengan kondisi kawasan, pada kelembagaan ini juga dikembangkan kegiatan simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro untuk membantu permodalan masyarakat perdesaan; (c) Pada kawasan agribisnis perlu dikembangkan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yang berfungsi sebagai sumber informasi (modal, pasar, teknologi dan pelatihan) bagi petani sekitarnya. Kegiatan ini sebaiknya merupakan kegiatan kerjasama lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, masyarakat dan atau swasta; (d) Pemberian fasilitas sarana dan prasarana strategis yang dibutuhkan masyarakat (pasar, jalan, irigasi, jaringan telepon / listrik, air bersih dan lain-lain) yang sesuai dengan *master plan*; (e) Pemberian insentif kepada pelaku agribisnis untuk mengembangkan produksi dan produk komoditi unggulan (harga dasar, pajak, permodalan dan lain-lain); (f) Pemberian insentif dan penghargaan terhadap aparaturnya dan petugas (seperti Camat, penyuluh/petugas lapangan, Kepala Desa/Kepala Dusun) yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Kawasan agribisnis (Djakapermana, 2007 dalam Adelina, 2023).

3. Konsep Partisipasi

Untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat, setiap perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mau mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh warga masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembanguana ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradig baru pambanunan yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1994 *dalam* Ife, 2013). Pendekatanpartisipatif secara substansial bisa meningkatkan efektivitas pembangunan, mulai dari penyusunan visi, misi dan strategi lembaga yang bergerak dalam kegiatan pembangunan ataupenyediaan pelayanan, melalui proses manajemen yang terkait dengan internal proyek baik secara umum maupun khusus hingga pelaksanaan proyek dan proses pengembangan masyarakat.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari: (1) partisipasi berupa hasil pikiran dalam kegiatan anjang sana, pertemuan, rapat, dan lainnya, (2) partisipasi tenaga dalam berbagai kegiatan bersama, (3) partisipasi harta benda yang diberikan seseorang untukmendukung kegiatan, (4) partisipasi keterampilan, (5) partisipasi sosial dalam paguyuban (Huraerah, 2008 *dalam* Laksana, 2013). Selain itu, bentuk atau tahapan partisipasi menurut Ndraha (1990) *dalam* Laksana (2013) yakni: (1) partisipasi dalam melakukan kontak denganpihak lain (*contact change*), (2) partisipasi dalam memperhatikan, memberikan tanggapan dan informasi, menyetujui atau menolak dalam proses pengambilan keputusan, (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, (5) partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, dan (6) partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

4. Kelembagaan Petani

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani mendefinisikan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur sebagai pendukung penguatan kerangka berfikir, serta landasan dalam perbandingan hasil penelitian dan penentuan metode yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Referensi hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Matriks Tinjauan Penelitian Terdahulu (*State of The Arts*)

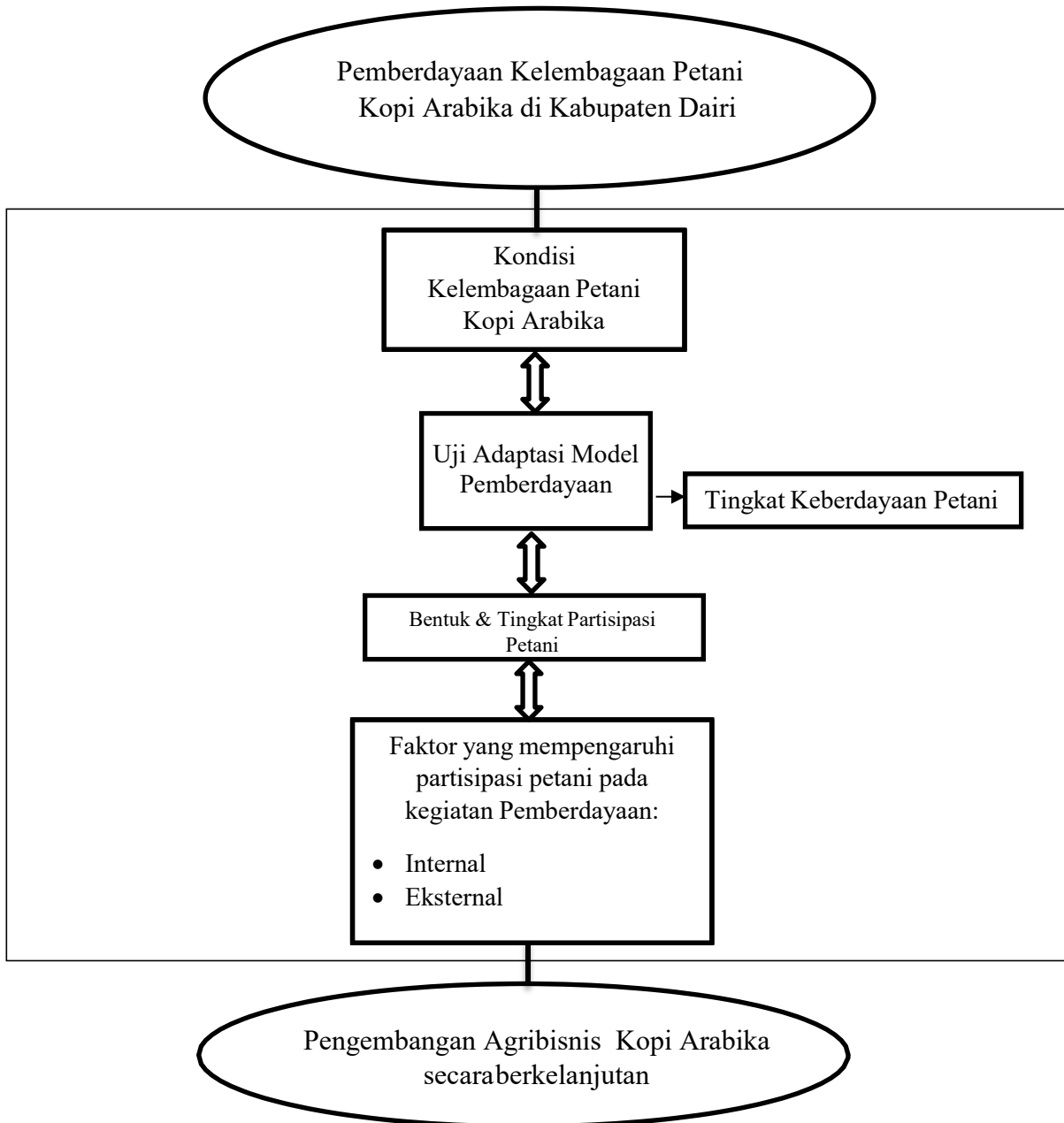
No.	Judul	Penulis	Tahun	Skala	Tujuan, Metode, Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Model Pemberdayaan Masyarakat	Kesi Widjajanti <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan</i> <i>Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 15-27</i>	2011		Tujuan: (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi modal sosial, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi eberdayaan masyarakat, dan (4) merumuskan model pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian prediksidan deskriptif yang melibatkan beberapa konsep	ada dua pola cara yang mengarah pada peningkatan keberdayaan masyarakat, dimana (1) pola yang terdiri dari dua tahapan untuk keberdayaan, dan (2) pola yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan diperlukan tiga tahapan proses aktivitas. Terdapat korelasi dimana semakin tinggi proses pemberdayaan akan dapat menciptakan keberdayaan masyarakat
2	Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji	Mustangin ¹ , Desy Kusniawati ² , Nufa Pramina Islami ³ , Baruna Setyaningrum ⁴ , Eni Prasetyawati ⁵	2017	Desa	pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus	Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat. Desa wisata di Bumiaji telah memberikan perubahan bagi masyarakat terlebih pada peningkatan pengetahuan dan perekonomian masyarakat.
3.	Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Penguatan Kapasitas Dalam Pengolahan Hasil Kopi Di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kab. Sumedang	Apsari, dkk	2017	Desa	Tujuan: (1) Meningkatkan kapasitas petani kopi desa Genteng dalam pengelolaan hasil alam, yaitu kopi, (2) Masyarakat diharapkan dapat lebih produktif untuk mengelola	Mayoritas penduduk menggunakan lahan pertanian untuk penanaman kopi dan tembakau. Pola tanam bagi petani kopi dan tembakau didasarkan atas perhitungan musim yang tepat. Petani kopi dalam hal ini diuntungkan karena letak desa dengan ketinggian yang sudah memadai bagi produk

					hasil pertanian kopi Metode: pendekatan kualitatif melalui assesment lapangan	kopi berkualitas dan dukungan pemerintah atas ketersediaan pemanfaatan hutan semi lindung. Namun, pola tanam masih menggunakan alat-alat tradisional oleh karena kebiasaan masyarakat dan ketidakinginan untuk berubah terhadap pemanfaatan teknologi. Tiap dusun memiliki kelompok tani tersendiri yang ditujukan untuk mempererat hubungan antar petani dan bekerjasama dalam pengelolaan hasilnya.
4	<i>The Community Empowerment Through Social and Educational Institutions</i>	Bayu Adi Laksono	2018	desa	tujuan: menggali peran lembaga sosial dan pendidikan dalam proses pemberdayaan masyarakat. metode: penelitian pendekatan kualitatif. observasi, interview, dan dokumentasi.	Masyarakat diberdayakan melalui pemanfaatan potensi alam maupun sumber daya manusia, untuk selalu bersikap optimis dan mandiri, serta diberdayakan melalui institusi pendidikan pendidikan persekolahan bertujuan untuk meningkatkan daya saing, pendidikan di luar sistem persekolahan untuk menjaga budaya dan nilai-nilai luhur masyarakat
5	<i>The Influence of Empowerment and Community Participation towards the Improvement of Community Welfare Recipient Community Empowerment Program Based in the City of Pekanbaru Riau Province</i>	Azharisman Rozie <i>Journal of Public Administration and Governance</i> 2018, Vol. 8, No. 3	2018	provinsi	Tujuan: menentukan konsepe dasar dari pembangunan, menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan dari program pembangunan serta melihat partisipasi, masyarakat terhadap program. Pendekatan kuantitatif	ada pengaruh Pemberdayaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Penerima. Pengaruh Partisipasi Komunitas di Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat masuk kategori “kuat” dan signifikan. Hasil juga menunjukkan pengembangan dari konsep Dimensions of Opportunities Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan konsep Partisipasi Masyarakat dalam Berbagai kegiatan Pembangunan

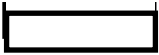

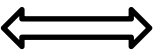
C. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini seperti disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan:

-  : area yang diteliti
-  : berhubungan
-  : sebab akibat

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Metode Dasar Penelitian

Penelitian ini akan mengaplikasikan desain penelitian deskriptif kualitatif.

Metode *mix method* digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan tujuan penelitian yang membutuhkan data kualitatif untuk mengidentifikasi dan menggali lebih dalam model pemberdayaan kelembagaan petani. Selanjutnya, diperlukan interpretasi data data empirik berupa gambaran yang terukur terkait hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan agribisnis kopi arabika.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah selama 12 bulan mulai bulan Januari hingga Desember 2023. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan subjek penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian yaitu petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petani yang mengikuti pemberdayaan kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi. Selanjutnya, untuk data kualitatif dibutuhkan *key informan* yang berasal dari *stakeholders* terkait pemberdayaan kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.

D. Teknik Pemilihan Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* yaitu melalui *purposive sampling*. Lokasi populasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah petani kopi arabika di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, dan Sidikalang. Jumlah petani dipilih secara proporsional dengan *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni sebanyak 60 orang petani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang telah tersedia

dalam bentuk dokumen-dokumen, data ini didapatkan dengan cara mempelajari atau meneliti arsip-arsip atau catatan-catatan yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti keadaan umum daerah penelitian di Kabupaten Dairi.

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Pengamatan tersebut misalnya berkaitan dengan kondisi wilayah dan aktifitas petani.
3. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi dan komunikasi langsung kepada informan dalam penelitian ini. Wawancara mendalam dibekali dengan panduan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti terkait model partisipasi dalam pemberdayaan kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.
4. Diskusi Kelompok Terpadu (*Focused Grup Discussion/FGD*)
Focused Grup Discussion (FGD) merupakan metode pengumpulan data dengan mengundang anggota kelompok petani responden yang telah dilakukan wawancara sebelumnya. Teknik FGD yang dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Diskusi yang dilakukan secara berkelompok dengan mengikuti panduan yang disediakan.

F. Teknik Analisa Data

Untuk menjawab tujuan penelitian diperlukan pengumpulan data kualitatif yang dapat dianalisis dengan cara: mempergunakan teknik triangulasi data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yaitu:

- Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.
- Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar disajikan dalam bentuk narasi dan data yang didapat diolah sehingga pembaca mengerti maksud dari tulisan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan FGD.
- Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.

BAB IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAIRI

4.1 Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Dairi terletak diantara 20 16'00'' 30 00'00'' Lintang Utara dan 980 00' 980 30' Bujur Timur, tepatnya di sebelah Barat Daya Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian wilayah antara 200 – 1.700 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Dairi adalah 1.927,80 km² atau sekitar 2.69 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara (71.680,68 km²).

Ibukota Kabupaten Dairi adalah Kota Sidikalang yang berada pada ketinggian 1.066 meter diatas permukaan laut. Wilayah ini merupakan salah satu dari 7 (tujuh) wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas/ Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Oleh sebab itu, salah satu upaya peningkatan ekonomi wilayah ini berpotensi untuk pengembangan destinasi pariwisata super prioritas nasional. Kabupaten Dairi terdiri dari 15 Kecamatan, 161 Desa dan 8 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 311.665. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

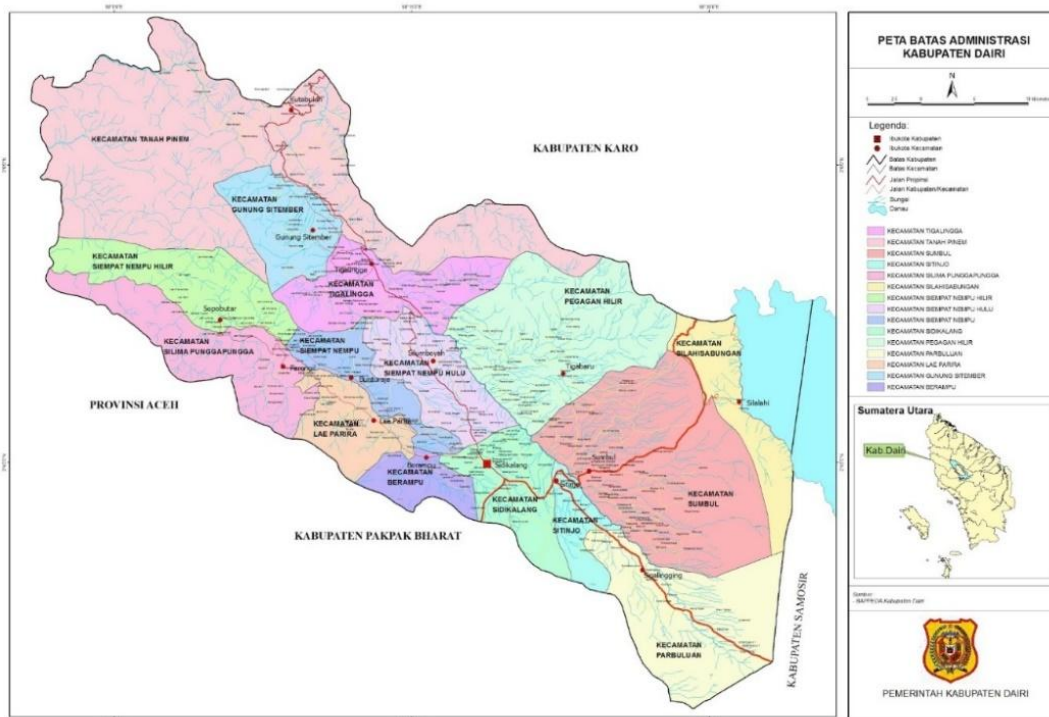


(Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2023)

Gambar 2. Peta Kabupaten Dairi

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Dairi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Aceh). Sebelah Timur wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Samosir, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kota Subulussalam (Aceh Selatan, Provinsi Aceh) (BPS, 2023).

Kabupaten Dairi adalah sebagian besar wilayahnya terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi sehingga termasuk daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Secara rinci, Kabupaten Dairi dan perbatasannya berdasarkan kecamatan disajikan pada Gambar berikut.



(Sumber: dairikab.go.id, 2023)

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Dairi

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa wilayah ini dominan posisinya berada pada dataran tinggi dimana terdapat sebanyak sembilan kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Dairi. Secara rinci letak geografis, luas dan ketinggian wilayah diatas permukaan laut per masing-masing kecamatan yang disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6. Letak Geografis, Luas dan Ketinggian Wilayah Diatas Permukaan Laut Per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Letak Geografis		Luas Wilayah (km ²)	Ketinggian Wilayah diatas permukaan laut
		Lintang Utara	Bujur Timur		
1	Sidikalang	02 ^o 45' 01.10"	98 ^o 18' 44.32"	70,67	1.068
2	Berampu	02 ^o 45' 17.29"	98 ^o 15' 07.75"	40,85	880
3	Sitinjo	02 ^o 44' 18.18"	98 ^o 21' 14.07"	53,15	1.080
4	Parbuluan	02 ^o 39' 33.16"	98 ^o 26' 38.06"	235,4	1.431
5	Sumbul	02 ^o 44' 32.88"	98 ^o 57' 56.72"	192,58	1.021
6	Silahasabungan	02 ^o 48' 40.96"	98 ^o 31' 19.28"	75,62	956
7	Silima Pungga-pungga	02 ^o 49' 44.62"	98 ^o 08' 41.28"	88,35	596
8	Lae Parira	02 ^o 47' 06.44"	98 ^o 13' 04.78"	42,75	777
9	Siempat Nempu	02 ^o 49' 14.68"	98 ^o 11' 57.59"	60,15	655
10	Siempat Nempu Hulu	02 ^o 49' 48.89"	98 ^o 15' 50.17"	93,93	935
11	Siempat Nempu Hilir	02 ^o 15' 58.22"	98 ^o 04' 51.21"	105,62	434
12	Tigalingga	02 ^o 54' 48.92"	98 ^o 13' 07.87"	197	473
13	Gunung Sitember	02 ^o 56' 26.89"	98 ^o 10' 29.36"	77	416
14	Pegagan Hilir	02 ^o 48' 47.17"	98 ^o 23' 38.28"	155,33	1.171
15	Tanah Pinem	02 ^o 02' 45.28"	98 ^o 08' 58.93"	439,4	200

(Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023)

Secara umum Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 sampai dengan 1.250 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Parbuluan sebagai wilayah kecamatan terluas yang berada pada dataran tertinggi yakni 1.431 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 235,4 km². Beberapa kecamatan lainnya yakni Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Silahasabungan, Kecamatan Lae Parira dan Kecamatan Berampu yang termasuk berada pada ketinggian diatas 700 meter diatas permukaan laut. Sementara wilayah terendah adalah Kecamatan Tanah Pinem yang berada pada 200 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah yakni 439,4 km².

Ketinggian wilayah di Kabupaten Dairi menjadi potensi bagi pengembangan komoditas kopi arabika. Syarat tumbuh varietas kopi arabika yakni minimal berada pada ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali untuk pengembangan komoditas kopi arabika di Kabupaten Dairi.

Kondisi iklim dapat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman kopi arabika. Musim hujan yang paling berpengaruh biasanya pada Bulan Januari, April, Mei, September, November, dan Desember setiap tahunnya. Angin laut berhembus kencang dari arah barat menuju timur sewaktu menjelang musim dingin yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Angin barat berhembus dengan kecepatan sedang dari arah timur menuju arah barat sewaktu menjelang musim kering. Kabupaten Dairi terdapat sungai-sungai yang jumlahnya cukup banyak dan

dipergunakan untuk irigasi, dimana sebagian besar sudah dimanfaatkan menjadi pengairan sawah, perikanan, dan kebutuhan air minum. Sungai terpanjang terdapat di Kecamatan Sumbul yakni 120 Km² dan Kecamatan Sidikalang 60 Km².

4.2 Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Dairi mencapai 315.460 orang dengan penduduk terbanyak berada pada ibukota kabupaten yakni Kecamatan Sidikalang berjumlah 54.160 orang. Secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1	Sidikalang	27.178	26.982	54.160
2	Berampu	4.678	4.545	9.223
3	Sitinjo	7.591	7.484	15.075
4	Parbuluan	13.107	13.009	26.116
5	Sumbul	23.537	23.169	46.706
6	Silahisabungan	2.663	2.718	5.381
7	Silima Pungga-pungga	7.256	7.499	14.755
8	Lae Parira	7.236	7.415	14.651
9	Siempat Nempu	10.278	10.336	20.614
10	Siempat Nempu Hulu	10.374	10.241	20.615
11	Siempat Nempu Hilir	6.057	5.908	11.965
12	Tigalingga	12.299	12.636	24.935
13	Gunung Sitember	5.622	5.387	11.009
14	Pegagan Hilir	8.519	8.559	17.078
15	Tanah Pinem	11.682	11.495	23.177
Jumlah		158077	157.383	315. 460

(Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023)

Berdasarkan Tabel 7 diatas diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Sidikalang berjumlah 54.160 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 27.178 orang dan perempuan sebanyak 26.982 orang. Sementara itu, Kecamatan Silahisabungan memiliki jumlah penduduk yang terendah yakni berjumlah 5.381 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 2.663 orang dan perempuan sebanyak 2.718 orang.

Penduduk suatu wilayah memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan daerah. Hal ini sebagai potensi sumber daya manusia daerah yang dapat dikelola dan dikembangkan sebagai faktor utama dalam pembangunan daerah. Jumlah pendapatan dan tingkat konsumsi penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada tahun 2023 persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah

garis kemiskinan) di Kabupaten Dairi tahun 2023 sebesar 7,47 persen (21,42 ribu jiwa). Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2022 yang mencapai 7,88 persen. Garis Kemiskinan di Kabupaten Dairi meningkat dari Rp. 436.713,- per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp. 463.360,- per kapita per bulan pada Tahun 2023.

Meningkatnya garis kemiskinan bagi masyarakat Kabupaten Dairi tentu menjadi perhatian yang serius. Semakin banyak penduduk yang miskin berarti semakin menurun kinerja pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dapat dikelola untuk diminimalisir melalui kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini rincian jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	0 – 4 Tahun	14.600	13.745	28.345
2	5 – 9 Tahun	15.774	14.968	30.742
3	10 – 14 Tahun	16.277	15.526	31.803
4	15 – 19 Tahun	15.974	15.114	31.088
5	20 – 24 Tahun	15.097	13.930	29.027
6	25 – 29 Tahun	13.028	11.511	24.539
7	30 – 34 Tahun	11.317	10.236	21.553
8	35 – 39 Tahun	10.219	9.547	19.766
9	40 – 44 Tahun	9.992	9.422	19.414
10	45 – 49 Tahun	8.726	8.568	17.294
11	50 – 54 Tahun	7.592	8.292	15.884
12	55 – 59 Tahun	6.374	7.403	13.777
13	60 – 64 Tahun	5.356	6.826	12.182
14	65 – 69 Tahun	3.848	5.476	9.324
15	70 – 74 Tahun	2.362	3.592	5.954
16	75+ Tahun	1.541	3.227	4.768
	Jumlah	158.077	157.383	315.460

(Sumber: Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2023)

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak adalah pada kelompok umur 10-14 Tahun dengan jumlah 31.803 orang, dimana penduduk laki-laki sebanyak 16.277 orang dan perempuan sebanyak 15.526 orang. Selanjutnya, jumlah penduduk terbanyak kedua adalah pada kelompok umur 15-19 Tahun dengan jumlah 31.088 orang, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 15.974 orang dan perempuan 15.114 orang. Angka tersebut dapat diprediksi dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan, sebagai angka penyumbang tertinggi pada usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sementara pada kelompok usia 55-

59 Tahun sebanyak 13.777 orang dan kelompok usia 60-64 Tahun sebanyak 12.182 orang yang diprediksi memasuki usia non produktif. Hasil analisis kondisi kependudukan tersebut tentu menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia daerah. Dengan tingginya angka usia produktif pada 5-10 Tahun kedepan, maka sudah saatnya sebagai Pemerintahan Daerah dapat menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Dairi.

Mayoritas suku masyarakat di Kabupaten Dairi adalah suku Pakpak, Batak Toba, Karo, Simalungun, Jawa, Minang dan suku lainnya. Keragaman keyakinan agama yang dianut masyarakat yakni Kristen 74,70 persen (Kristen Protestan 68,30 persen, Katolik 6,40 persen), Islam 24,70 persen, Buddha 0,55 persen, Hindu 0,03 persen, Konghucu 0,01 persen dan Aliran Kepercayaan 0,01 persen. Masyarakat hidup harmonis dalam toleransi keberagaman latar belakang tersebut.

4.3 Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi memiliki visi yakni: “Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian; (2) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing; (3) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah; (4) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Government* (pemerintahan yang bersih) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (5) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi telah menyusun program unggulan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Daerah (RPJMD) Tahun 2019- 2024 adalah: (1) Dairi cerdas, (2) Dairi sehat, (3) Agri unggul, (4) Dairi kreasi, (5) Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Untuk

Menopang Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, (6) Infrastruktur Konektifitas Wilayah, (7) Gerakan Bangun Desa Unggul Mandiri, (8) Dairi Gerak Cepat. Program Agri unggul telah dirancang untuk komoditi kopi, dengan pertimbangan bahwa usaha tani kopi merupakan satu sumber pendapatan masyarakat Dairi. Oleh karena itu, dengan menggalakkan usaha tani kopi diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Sekitar 42,87 persen. mayoritas penduduk di Kabupaten Dairi adalah sebagai petani (Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2023).

Berdasarkan informasi Dinas Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023, diketahui bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi berada pada 71,84 dari angka rerata keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara adalah 72,71. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 2,05 persen. Disisi lain, angka tingkat pengangguran sebesar 1,49 persen. Secara umum, beberapa sumber mata pencaharian Masyarakat di Kabupaten Dairi adalah (1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (42,87 persen), (2) sebesar 26,05 persen terdapat 14 sektor lapangan usaha lainnya, (3) Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,55 persen, serta (4) bidang konstruksi sebesar 13,53 persen.

4.4 Potensi Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Dalam tren konsumsi kopi secara global, dimana konsumen kopi lebih fokus pada konsep kopi artisan berkualitas tinggi yang diproduksi dengan skala kecil namun dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan (*sustainable*) didukung oleh teknologi yang memadai. Jenis kopi di Indonesia ini rasanya kuat karena kafein dalam kopi ini cukup tinggi. Meski begitu, setelah menyeruput kopi ini, akan ada sedikit rasa manis yang terasa di lidah. Untuk aroma, ada bau yang samar-samar akan tercium seperti coklat.

Masyarakat Kabupaten Dairi sudah mengenal dan melakukan budidaya tanaman kopi arabika sejak Tahun 1800an. Kopi Arabika dengan sebutan Kopi Arab yang dikembangkan melalui Tanam Paksa (*Cultur Stelsel*) masa Kolonial Belanda. Tanaman Kopi Arabika yang ditanam pada ketinggian antara 1.000 m – 1.700 m dpl, tumbuh dan menghasilkan kopi dengan kualitas yang sangat baik di wilayah yang terdapat pada 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Dairi, yaitu Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Pegagan Hilir. Kualitas Kopi Arabika yang sangat baik tersebut dipengaruhi oleh

kondisi tanah yang berkaitan dengan letusan Gunung Toba sekitar 73.000 tahun lalu, ketinggian wilayah tanam berkisar antara 1.000 – 1.700 m dpl dan budaya masyarakat setempat yang sudah sangat kental dengan budidaya komoditi kopi maupun produk kopi.

Kopi Arabika Sumatera Sidikalang merupakan kopi *specialty* dengan citarasa *excellent* yang memiliki aroma *floral, spicy, caramelly, lemony, herba* dan *earthy* yang sangat menarik. Biji kopi arabika diproses dari hasil panen 100 persen buah yang masak merah sempurna atau matang fisiologis. Adapun varietas tanaman kopi yang banyak dibudidayakan adalah Varietas Sigarar Utang, Lini S 795, USDA 762 dan P88 serta beberapa varietas unggul lokal lainnya seperti Lasuna dan Garunggang. Pengolahan buah kopi merah tersebut dilakukan dengan menggunakan Olah Basah Giling Basah (OBGB), Teknik *Natural Process* dan *Honey Process* dan menghasilkan produk berupa Kopi Beras, Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk.

Berdasarkan Laporan Hasil Uji Citarasa (*Report of Cup Testing*) oleh Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember untuk tiga sampel, yaitu (1) Ketinggian wilayah 1.000 – 1.400 m dpl, dengan Final Score Notation : 83,50; (2) Ketinggian 1.400 – 1.600 m dpl, dengan Final Score Notation : 86,25; dan (3) Ketinggian > 1.600 m dpl, dengan Final Score Notation : 85,00. Sesuai dengan data perolehan *Final Score Notation*, menggambarkan bahwa Kopi Arabika Sumatera Sidikalang masuk pada kategori *Specialty Grade*, dimana seluruh sampel yang dianalisis pada *Final Score Notation* adalah diatas nilai 80.

Kopi Arabika Sidikalang atau asal Kabupaten Dairi memiliki beberapa keunggulan yakni: (1) memiliki aroma yang khas dan tidak terlalu tajam, dimana cita rasa mirip coklat, sedikit manis, (2) tingkat keasaman yang dihasilkan termasuk rendah sehingga aman dikonsumsi, (3) termasuk *long after taste* yang tinggi yaitu memiliki daya tahan yang tinggi rasa kopi yang tertinggal di mulut dan tenggorokan setelah meminumnya. Keunggulan citarasa kopi arabika yang diproduksi oleh petani di Kabupaten Dairi menjadi peluang yang menjanjikan untuk mengembangkan agribisnis kopi. Berikut ini jumlah luas areal tanam dan produksi kopi arabika di Kabupaten Dairi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, secara rinci disajikan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Luas Tanam dan Jumlah Produksi Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Jenis Kopi	Tahun	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Ton/ Ha)
Arabika	2019	12.416	10.871,22	1.032,96
	2020	13.191	11.030	1.033,36
	2021	13.598	13.025,97	1.129,49
	2022	13.824,84	15.609,48	1.236,90

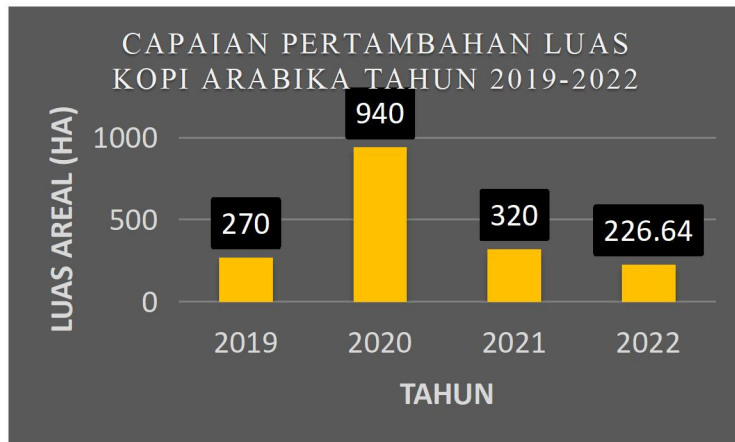
Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2023

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa terdapat penambahan luar areal tanam dan peningkatan jumlah produksi setiap tahunnya. Tahun 2022 terdapat peningkatan produksi mencapai 15.609,48 Ton dengan luas areal tanam 13.824 Hektar atau rata-rata produksi sebesar 1.236,90 Ton/Ha. Peningkatan produksi diharapkan bisa dicapai melalui intensifikasi dengan praktek budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*) tanaman kopi arabika oleh para petani di Kabupaten Dairi. Semakin tinggi penerapan praktek budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*) tanaman kopi arabika oleh para petani, maka bukan saja produksi saja yang meningkat namun juga kualitas mutu kopi yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini tentu dapat meningkatkan nilai harga jual kopi arabika dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.

Kopi Arabika Sumatera Sidikalang saat ini sudah sangat terkenal dan sudah diekspor ke berbagai negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Belanda. Oleh sebab itu, Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang (LMPIG KASS) sebagai kelembagaan masyarakat pemerhati Kopi Arabika Sumatera Sidikalang, mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Sumatera Sidikalang kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Dengan adanya IG Kopi Arabika Sumatera Sidikalang akan terhindar dari pemalsuan dan penggunaan ilegal nama dan kualitas Kopi Arabika Sumatera Sidikalang, sehingga manfaat keberadaan Kopi Arabika Sumatera Sidikalang dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha Kopi Arabika Sumatera Sidikalang dan oleh masyarakat Kabupaten Dairi pada umumnya.

Potensi tersebut terus diupayakan secara konsisten oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi yang berasal dari Kabupaten Dairi. Terdapat beberapa program kerja yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi, yakni: (1) komitmen

menuju penanaman kopi 5.000 Hektar dalam rangka melaksanakan misi Agri unggul, (2) target perluasan tanam Kopi Arabika Tahun 2023 seluas 500 sampai dengan 1.000 Ha, (3) penetapan sentra lokasi kopi arabika di Kabupaten Dairi terdapat di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Pegagan Hilir, Sitingjo, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu sesuai dengan syarat ketinggian wilayah untuk tumbuh pada tanaman kopi arabika. Saat ini, capaian pertambahan luas kopi arabika Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 yakni seluas 1.756,64 Hektar. Secara rinci disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, 2023

Gambar 4. Grafik Capaian Pertambahan Luas Kopi Arabika di Kabupaten Dairi Tahun 2019-2022

Berdasarkan Gambar 4 diatas diketahui bahwa penambahan luas areal tanam yang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yakni mencapai seluas 940 Hektar, dan terendah pada Tahun 2022 yakni seluas 226,64 Hektar. Penambahan luas areal tanam komoditi kopi arabika di Kabupaten Dairi terus diupayakan dengan mendukung para petani untuk mengelola lahan yang masih belum produktif serta mengembangkan konsep budidaya kopi arabika berbasis lahan hutan atau *agroforestry*.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat kebijakan dan program Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika antara lain sebagai berikut:

1. Program Intensifikasi Kopi

Program ini terdiri dari penyediaan sarana produksi pertanian, akses permodalan usaha tani melalui perbankan, jaminan pembelian hasil produksi kopi oleh *off-taker*, kegiatan

pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan Pertemuan Petani, *Training of Trainer* (ToT) budidaya yang baik pada tanaman kopi arabika dengan menjalin kerjasama kemitraan bersama dengan Bank Indonesia, *Louis Dreyfus Company* (LDC), Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), PT.Pakpak Agro Lestari (PAL), Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

2. Program Ekstensifikasi Kopi

Program ekstensifikasi dilakukan dengan membangun ekosistem inklusif terintegrasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menyediakan antara lain: penyediaan sarana produksi pertanian, akses permodalan usaha tani melalui perbankan, jaminan pembelian hasil produksi kopi oleh *off-taker*, kegiatan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dan Pertemuan Petani.

Program ekstensifikasi kopi dengan target Perluasan Areal Tanaman Baru (PATB) seluas 5.000 Hektar, dimana hasil capaian sampai Tahun 2022 seluas 1.756,64 Hektar. Kondisi tersebut masih perlu dilakukan secara intensif dan konsisten untuk target yang masih harus diupayakan seluas 3.243,36 Hektar hingga Tahun 2024 nanti.

Keberadaan Kabupaten Dairi menjadi wilayah strategis dalam pengembangan pariwisata nasional, memberikan peluang pada penumbuhan dan pengembangan usaha masyarakat lokal. Mengacu pada regulasi, pembangunan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi pengangguran. Lima jenis dampak usaha pariwisata terhadap hak asasi manusia, yaitu: penunjukan kawasan wisata, usaha hiburan-minuman, usaha akomodasi dan makanan, usaha angkutan pariwisata, dan usaha rekreasi dan wirausaha (Kurniawan dan Primawardani, 2021). Oleh sebab itu, potensi pengembangan agribisnis kopi arabika sebagai komoditas lokal menjadi keunggulan bagi petani di Kabupaten Dairi. Sebagaimana yang telah dilakukan pada Februari 2023 melalui Festival F1 *Powerboat Lake* (F1H2O) Kawasan Danau Toba yang berskala internasional, Bupati Dairi memperkenalkan kopi kapsul yang berasal dari Kecamatan Sidikalang (dairikab.go.id, 2023).

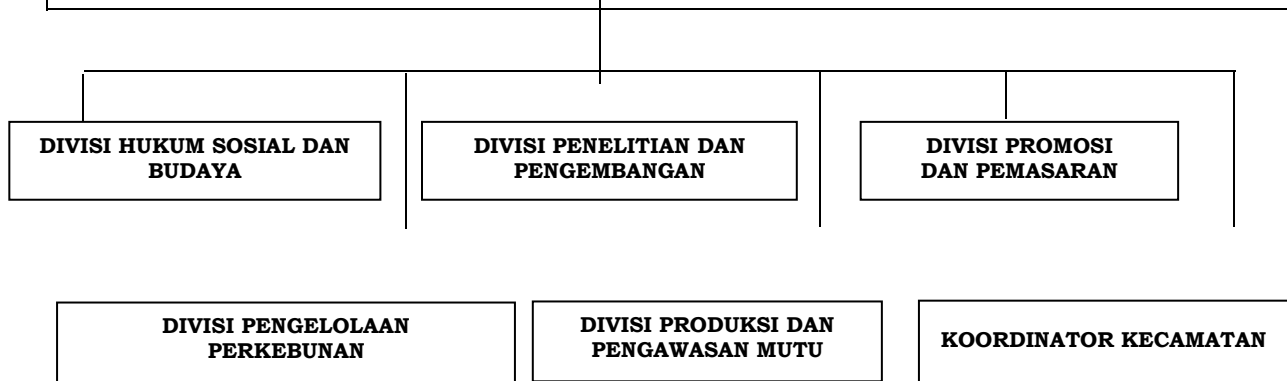
BAB V.
ANALISIS KONDISI KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENDUKUNG
AGRIBISNIS KOPI ARABIKA DI KABUPATEN DAIRI

5.1 Profil Kelembagaan Petani Kopi Arabika Kabupaten Dairi

Kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi dengan nama Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang (LMPIG KASS) dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 274/525.27/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang. Selanjutnya sebagai ketentuan dan persyaratan lainnya, bahwa diperlukan adanya Surat Dukungan Bupati Dairi kepada LMPIG KASS. Bentuk Surat Dukungan Bupati Dairi untuk LMPIG KASS dalam hal mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Struktur Organisasi dan Kepengurusan LMPIG KASS ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi No. 274/525.27/VIII/2018, Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang. Struktur Organisasi dan Kepengurusan LMPIG KASS adalah sebagai berikut:

PENASEHAT	: Bupati Dairi Ketua DPRD Kabupaten Dairi Ir. Togam Gultom Dr. Juniver Girsang, SH, MH Ir. Jisman Hitasoit Johannes Lianto
PEMBINA	: Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Kepala Dinas Perindag Kabupaten Dairi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Kepala Bappeda Kabupaten Dairi Kepala DPMPTSP Kabupaten Dairi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Dairi Kepala Badan Litbang Kabupaten Dairi
DEWAN	: Erwin Sitohang Suryadi Bambang Subiyakto
KETUA UMUM	: Pdt. Samuel Sihombing
WAKIL KETUA	: Edwin G. Nababan, SP
SEKRETARIS	: Iswan Togi Raja, SE
WAKIL SEKRETARIS	: Berkah Anugerah Karunia Situmorang, SH
BENDAHARA	: Martupa Togatorop
WAKIL BENDAHARA	: Murni Manik



Gambar 5. Struktur Kepengurusan LMPIG KASS

Setiap pengurus dan anggota LMPIG KASS memiliki kartu anggota dan wajib mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMPIG KASS. Pengurus dan anggota yang tidak mematuhi peraturan dimaksud akan tetap dievaluasi keanggotaannya. Nama, alamat dan kedudukan dari masing-masing anggota ditabulasi dalam dokumen resmi.

Anggota LMPIG KASS memiliki unsur terdiri dari petani pengolah dan pedagang, dengan uraian sebagai berikut: (1) Petani berjumlah 200 orang yang tergabung dalam 10 kelompok tani, (2) Pengolah berjumlah 3 orang, (3) Pedagang berjumlah 4 orang. Anggota LMPIG KASS akan terus meningkat seiring dengan perkembangan organisasi dan waktu. Perubahan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh LMPIG KASS dalam bentuk dokumen deskripsi perubahan. LMPIG KASS memiliki Logo Organisasi yang akan digunakan dalam administrasi LMPIG KASS. Alamat Kantor Sekretariat LMPIG KASS beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 181 Kel. Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara



Gambar 6. Logo LMPIG KASS

Filosofi/makna Logo, adalah sebagai berikut:

1. Gunung dan lembah: simbol dari daerah dataran tinggi, sumatera bagian utara, simbol dari daerah dataran tinggi, sumatera bagian utara, di sekitar danau toba.
2. Tangan terbuka: sebagai penopang keutuhan lingkungan hidup melalui tanaman kopi.
3. Dua biji kopi dan daun: produk unggulan dan utama dari Kabupaten Dairi.
4. Lingkaran merah, putih dan hitam: simbol ikatan pemersatu, dan simbol warna Kabupaten Dairi.
5. Warna biru: danau toba yang berada di kawasan budidaya kopi arabika
6. Tulisan kopi arabika sumatera sidikalang: pemegang hak atas kopi arabika Sidikalang.

5.2 Kondisi Kelembagaan Petani Kopi Arabika Kabupaten Dairi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diklasifikasikan dalam empat aspek, yaitu: (1) sumber daya manusia (SDM) petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (2) budidaya tanaman kopi arabika di Kabupaten Dairi, (3) kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (4) ekosistem dalam pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Berikut ini secara rinci hasil identifikasi kondisi kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi.

5.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Dalam Mendukung Agribisnis Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Sumber daya manusia (*human resources*) menurut Sumarsono (2003) dalam Kusnandy (2021) memiliki dua arti yang berbeda diantaranya adalah (1) sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang bertujuan untuk melakukan proses produksi yang berkualitas dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa; (2) sumber daya manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis atau dengan kata lain adalah kegiatan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Petani kopi arabika di Kabupaten Dairi tersebar pada Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Pegagan Hilir. Jumlah petani kopi arabika lebih banyak dibandingkan petani kopi robusta. Kopi arabika memiliki citarasa yang khas dan nilai jual yang tinggi dibandingkan kopi robusta. Mestinya, hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kopi arabika di Kabupaten Dairi. Namun kondisinya saat ini, petani kopi arabika belum mampu menghasilkan biji kopi yang berkualitas mulai dari proses produksi seperti budidaya yang baik hingga penanganan pascapanennya.

“...Kopi arabika sebenarnya menjadi kopi andalan daerah Kabupaten Dairi. Kondisi geografis daerah mempengaruhi pada citarasa khas kopi yang dihasilkan oleh para petani dari wilayah ini. Namun, kopi arabika belum dikembangkan dengan baik oleh para petani seperti penggunaan tanaman penaung, bibit yang unggul serta proses panen dan pascapanen yang menentukan mutu biji kopi yang dihasilkan. SDM petani kopi arabika mayoritas sudah berada

pada usia yang tidak muda lagi dimana cara budidayanya juga masih sebatas pengetahuan dan pengalaman secara turun-temurun dari lingkungan sosialnya. Rendahnya harga jual kopi tersebut, mengakibatkan sekarang ini bertani kopi sebagai sumber mata pencaharian tambahan. Petani lebih serius mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura yang hasilnya dapat dengan cepat diterima petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itulah, saat ini Pemerintahan Kabupaten Dairi memiliki komitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembalikan kejayaan kopi Dairi... (Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, DT (44 Tahun), 27 Juni 2023).

Kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, bahwasanya komunitas Maspigass memberikan edukasi penyadaran tentang kemandirian petani untuk menghasilkan bibit kopi dari hasil panen kopi secara mandiri. Selain itu, anggota kelompok dapat melakukan kegiatan simpan pinjam melalui koperasi *Credit Union* yang dapat memberikan penyadaran kepada anggota pentingnya kekuatan ekonomi petani secara kolektif.

“...Maspigass merupakan komunitas petani yang diinisiasi secara swadaya oleh beberapa orang pendiri yang berperan sebagai pelaku usaha kopi di Kabupaten Dairi. Maspigass memberikan edukasi kepada anggotanya untuk membangun kesadaran masyarakat petani kopi agar dapat menghasilkan kopi yang berkualitas dan berkelanjutan secara kolektif. Kegiatan Maspigass antara lain adanya pertemuan rutin kelompok dengan agenda edukasi proses budidaya tanaman kopi arabika secara berkelanjutan, memupuk kekuatan kolektif untuk mandiri menghasilkan bibit kopi arabika, kegiatan simpan pinjam usaha tani anggota serta membangun kesadaran kritis dan partisipasi petani dalam proses pembangunan di desa masing-masing...” (Wawancara dengan Pengurus Maspigass, ITR (46 Tahun), 27 Juni 2023).

Komunitas Maspigass juga bekerja sama dengan lembaga asing dari Jerman HRNS menanamkan prinsip kemandirian dan tanggung jawab terhadap petani sehingga petani kopi lebih kreatif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kerjasama tersebut didukung sepenuhnya oleh Pemerintahan Kabupaten Dairi melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bupati Dairi, HRNS dan Komunitas Maspigass. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengurus Komunitas Maspigass diberikan kapasitas melalui *Training of Trainer* (ToT) budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*) tanaman kopi

arabika. Untuk selanjutnya, peserta ToT memiliki tugas untuk menjadi fasilitator yang memberikan edukasi dan pendampingan kepada para petani kopi arabika. Saat ini, pembinaan petani kopi arabika telah dilakukan pada 3.000 petani di Kabupaten Dairi.

“...Maspigass, PPL bersama HRNS juga berperan dalam mendampingi petani disetiap permasalahannya salah satu contoh kurangnya ketersediaan bibit kopi, dengan menanamkan prinsip kemandirian kepada petani sehingga petani mampu menyediakan bibit secara mandiri dari hasil panen lalu yang dikecambahkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan petani. Kemampuan penyediaan bibit kopi arabika secara mandiri dapat meringankan biaya produksi usaha tani kopi arabika yang dikelola oleh petani di Kabupaten Dairi...” (Wawancara dengan Pengurus Maspigass sekaligus Fasilitator HRNS, LH (43 Tahun), 27 Juni 2023).

Selanjutnya, keberadaan tokoh petani lokal yang sudah berhasil (*local champion*) dapat menjadi katalisator dalam proses peningkatan kapasitas petani kopi arabika. Berdasarkan lokasi penelitian, ada empat (4) orang petani lokal yang telah berperan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk memajukan usaha tani kopi arabika di Kabupaten Dairi. Berikut masing-masing perannya, adalah:

- 1) Ketua Kelompok Tani di Desa Perjuangan Kecamatan Sumbul, yang menerapkan budidaya tanaman kopi arabika secara organik. Beliau melakukan budidaya secara organik atas dasar pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari orang tuanya dan sekarang beliau juga meneruskan penerapan budidaya kopi organik kepada anak-anaknya. Pertimbangannya adalah lahan yang dikelola harus tetap dijaga kelestariannya, tidak saja mengambil hasil tanamannya tapi juga harus dikelola untuk generasi selanjutnya. Prinsip pertanian berkelanjutan sudah menjadi *positive mindset* dalam keluarganya sejak mengenal dan mengelola tanaman kopi arabika.
- 2) Salah satu Pendiri Komunitas Maspigass sekaligus Ketua Kelompok Tani di Desa, melakukan proses budidaya tanaman kopi arabika sesuai dengan GAP dan melakukan proses penanganan pascapanen hingga memasarkan produk kopi arabika yang dihasilkan kelompok tani dengan label usaha “Bolon Coffee”.
- 3) Praktisi Kopi sekaligus Pengusaha Kopi di Kecamatan Sidikalang juga sebagai Ketua komunitas Maspigass yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam mendampingi petani kopi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas tanaman kopi mereka dengan harapan petani dapat berkontribusi dalam memajukan kopi dairi. Kebun kopi arabika yang dikelolanya

menjadi kebun percontohan yang sering dikunjungi oleh Stakeholders lokal, nasional dan internasional (Jerman, Amerika, Inggris). Termasuk juga menjadi salah satu mitra Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang menempatkan salah satu lokasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) I Mahasiswa Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi di lokasi tersebut. Saat ini, kopi arabika yang dikelola sudah maju dengan pemasaran ke luar negeri. Selain sebagai praktisi, pengusaha dan pemerhati kopi arabika di Kabupaten Dairi, beliau juga sebagai tokoh pemimpin agama yang konsen untuk mengajak jemaatnya dapat menerapkan hidup menjadi manusia yang berguna dan memberikan perubahan untuk kemajuan daerah. Seperti contoh nyata, saat ini beliau sedang mendirikan Pusat Edukasi Kopi (*Education Coffee Center*) di Kabupaten Dairi.

- 4) Salah satu tokoh petani lokal dari kalangan generasi milenial yang merupakan Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Sidikalang juga telah menerapkan budidaya tanaman kopi yang ramah lingkungan dengan mengelola kebun kopi dengan pola tumpang sari (*intercropping*). Meskipun bukan dari lulusan Sarjana Pertanian, beliau mau untuk belajar hal baru seperti penerapan budidaya tanaman ramah lingkungan dengan mengelola sumber daya lokal. Saat ini, beliau juga sudah menjadi salah satu petani milenial yang mampu mengajak petani untuk menerapkan budidaya tanaman yang baik (*Good Agriculture Practices*) serta melakukan proses panen dan penanganan pascapanen (*Good Handling Practices*).
- 5) Petani kopi arabika di Kecamatan Parbuluan mengelola tanaman dengan anjuran GAP juga telah dilakukan, dengan adanya dukungan sarana prasarana dan pemasaran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bangun. Peran Kepala Desa bersama dengan Manajer BUMDes sekaligus petani kopi arabika yang berkomitmen untuk memajukan usaha tani kopi arabika yang mayoritas menjadi sumber pendapatan masyarakat desa, membentuk BUMDes dengan dukungan alokasi dana desa.

5.2.2 Budidaya Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Hasil observasi lapangan, sebagian besar petani dalam melakukan budidaya tanaman kopi arabika masih belum sesuai dengan praktek budidaya tanaman yang baik (*Good Agriculture Practices*). Tanaman kopi arabika dikelola tanpa menggunakan tanaman penayang. Pemeliharaan tanaman seperti pemangkasan dan sanitasi di areal sekitar kebun dan tanaman masih belum sesuai anjuran. Begitu juga untuk pengendalian hama penyakit masih dilakukan secara kimiawi. Selanjutnya, proses panen juga belum sesuai syarat ketentuan warna buah merah (*red cherry*)

kopi. Petani masih melakukan budidaya dengan pemahaman sendiri dan pertimbangan waktu kerja. Hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap hasil kualitas mutu biji kopi dan harga jual dari hasil kopi arabika yang dipanen.

“...Banyak petani kopi yang masih menerapkan budidaya tanaman yang belum sesuai dengan anjuran dalam GAP kopi arabika. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan keyakinan diri petani untuk menerapkan GAP kopi di lahannya. Petani harus melihat contoh langsung dari praktek GAP yang benar dari petani yang sudah lebih maju pola pikirnya. Seperti penanaman tanaman penaung yang memang menjadi kebutuhan bagi tanaman kopi yang tidak membutuhkan cahaya matahari 100 persen. Anggapan bahwa tanaman penaung dapat mengurangi jumlah produksi adalah hal yang keliru selama ini. Kelompok tani menjadi wadah untuk penyebaran informasi dan edukasi harus bisa dilakukan secara optimal untuk mengajak para petani bisa merubah kebiasaannya dalam budidaya tanaman kopi arabika...” (Wawancara dengan Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi, SEA (43 Tahun), 28 Juni 2023).

Pengetahuan dan keterampilan petani menjadi perhatian yang serius karena sebagai pelaku utama produsen kopi arabika yang harus meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Anggapan yang keliru dalam proses budidaya tanaman yang baik masih harus diperjelas dan diberikan contoh yang benar dan tepat dengan cara yang mudah untuk diterapkan oleh para petani. Perubahan pola pikir dan praktek budidaya tanaman yang baik menjadi perhatian yang serius agar terjadi peningkatan kapasitas petani serta tercapai peningkatan produksi secara kuantitas dan kualitasnya. Oleh sebab itu, penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok tani terus dilakukan saat ini baik dari pemerintah maupun non pemerintah serta para petani kopi arabika yang sudah memiliki kapasitas dalam menerapkan budidaya yang baik.

5.2. 3 Kelembagaan Petani Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Saat ini kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi yang bernama Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang (LMPIG KASS) masih pada tahap proses revisi dokumen sejak adanya pembinaan oleh Pemerintahan Kabupaten Dairi dan Kemenkumham wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan kelembagaan ini berjalan dikelola oleh Pengurus yang sebelumnya disebut dengan nama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geograsi Arabika Sidikalang Sumatera (Maspigass).

Maspigas merupakan komunitas petani kopi arabika yang memiliki anggota kelompok tani dengan kegiatan budidaya dan usaha simpan pinjam yang dikelola secara mandiri dengan sistem koperasi *Credit Union* (CU). Maspigas saat ini memiliki mitra kerjasama sama dengan lembaga non pemerintahan Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) Jerman. Kerjasama tersebut dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia petani kopi arabika yang menjadi anggota Maspigas yang berasal dari 13 kelompok tani di Kecamatan Sumbul, Kecamatan Sidikalang dan Kecamatan Parbuluan.

Berdasarkan observasi di lapangan dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci, diketahui bahwa karakteristik masyarakat secara hubungan sosial di Kabupaten Dairi ada beberapa hal, antara lain:

- 1) Sulit untuk percaya dengan pengetahuan dan teknologi baru kalau belum ada bukti nyata yang bisa dilihat secara langsung. Apabila dalam suatu sistem sosial terdapat petani yang sudah berhasil, maka petani lainnya memiliki keinginan untuk mencoba mempelajari dan menerapkannya. Kalau yang diterapkan tersebut nantinya tidak berhasil, maka petani lain disekitarnya juga tidak akan ikut menerapkan. Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan bagi para penggerak kopi arabika Kabupaten Dairi, agar dapat menemukan tokoh lokal yang berpengaruh yang dapat memberikan contoh keberhasilan seperti *success story* kepada para petani di sekitarnya. Proses pembelajaran sosial (*social learning*) menjadi sangat memungkinkan dilakukan antar sesama petani dalam kelompok dibandingkan dari luar kelompoknya sendiri.
- 2) Perbedaan pendapat dan persepsi tentang gerakan kolektif (*collective action*) menghambat kemajuan kelembagaan petani kopi arabika seperti dalam proses pengurusan sertifikat indikasi geografis kopi arabika asal Dairi. Persepsi yang keliru bahwa asal-usul kopi (*traceability*) dan sertifikat indikasi geografis kopi tidak berdampak pada nilai jual kopi tersebut selama ini.
- 3) Petani kopi arabika juga melakukan praktek pemasaran tanpa membawa nama asal kopinya dan dengan label asal kopi arabika dari daerah lain (*black market*).

Kelembagaan secara sadar ditempatkan dalam bingkai perubahan sosial yang direncanakan (*social planned change*) pembangunan pertanian dan pedesaan. Aspek kelembagaan dapat ditempatkan sebagai “*means*” dalam rangka mewujudkan tujuan atau “*goals*” pembangunan pertanian dan pedesaan. Kelembagaan petani merupakan basis utama dalam upaya

membangun dan mengembangkan agribisnis kopi arabika secara meluas dan merata untuk mengembalikan kejayaan kopi di Kabupaten Dairi. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, mendefinisikan bahwa kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Pemberdayaan Petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok atau disebut dengan kelompok tani (poktan). Regulasi tersebut menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuhkembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.

Kelompok tani atau poktan memiliki fungsi sebagai: (1) kelas belajar: poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik; (2) wahana kerja sama: poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan; dan (3) unit produksi: usahatani masing-masing anggota poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Tiga fungsi kelompok tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kelompok. Selanjutnya, bisa berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani yang dapat menjadi sentra perekonomian petani dalam mencapai kesejahteraan secara kolektif.

Saat ini, petani kopi arabika telah tergabung dalam kelompok-kelompok skala kecil di tingkat desa di Kabupaten Dairi. Kelompok-kelompok tani telah tergabung dalam gabungan kelompok tani yang berada pada masing-masing kecamatan. Dalam penumbuhan kelompok tani, berdasarkan Permentan Nomor 67 Tahun 2016 bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial-ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan

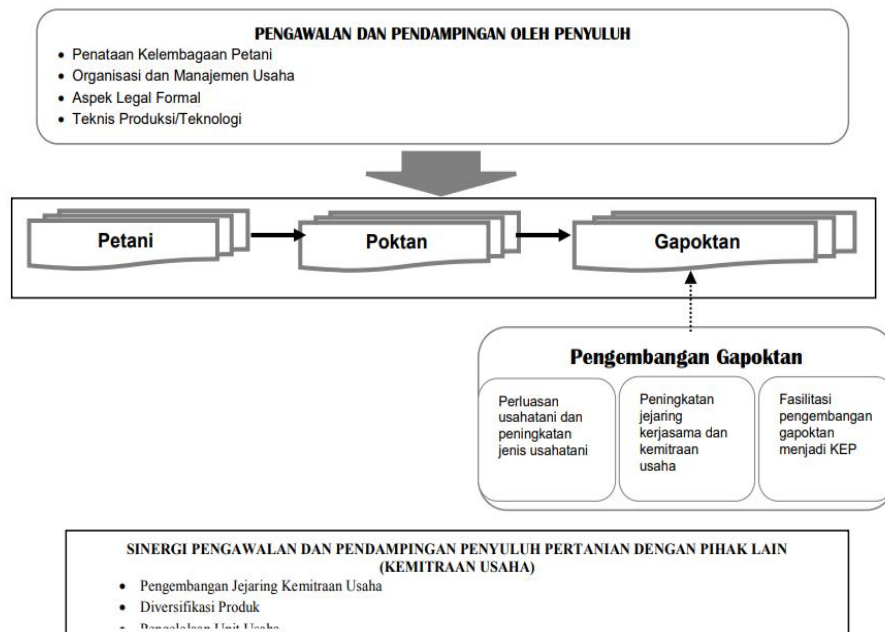
keserasian hubungan antar anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan. Prinsip-prinsip penumbuhan poktan adalah: (1) kebebasan, artinya menghargai setiap petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama; (2) keterbukaan, artinya kegiatan poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota; (3) partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola poktan (merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi); (4) keswadayaan, artinya pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana produksi, dan pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan kemandirian Poktan; (5) kesetaraan, artinya hubungan antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha harus merupakan mitra sejajar; dan (6) kemitraan, artinya kerjasama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. Pengembangan poktan diarahkan pada: (a) penguatan poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri; (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis; dan (c) peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya.

Kelembagaan Petani ditumbuhkembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit Usahatani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam). Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Fungsi Gapoktan a. unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usahatani yang bersumber dari kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha. b. Unit Usahatani/Produksi Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. c. Unit Usaha Pengolahan Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. d. Unit Usaha Pemasaran Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian

anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani mandiri, e. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam) Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usahatani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

Peningkatan kemampuan Gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (a) unit usaha sarana dan prasarana produksi, (b) unit Usahatani/produksi, (c) unit usaha pengolahan, (d) unit usaha pemasaran, (e) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam), dan (f) unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan ruang lingkup pengembangan, meliputi:

1. peningkatan dan perluasan usahatani serta jenis usahatani berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
2. peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; dan
3. fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP).



(Sumber: Permentan No.67 Tahun 2016)

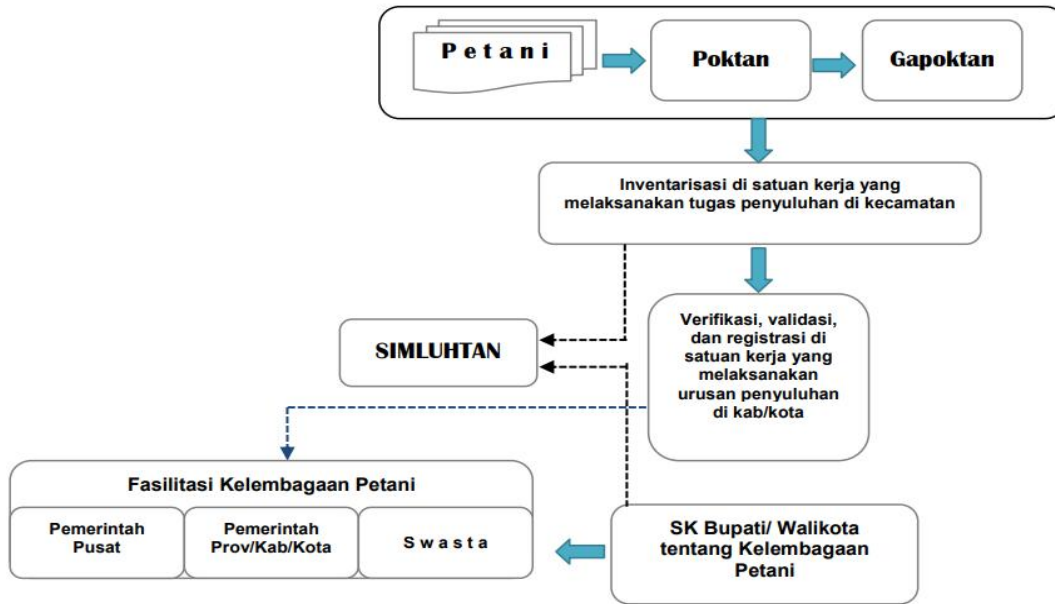
Gambar 7. Strategi Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan

Selanjutnya, dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 juga menjelaskan tentang

pembentukan asosiasi komoditas pertanian ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola usahatani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Asosiasi komoditas pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dalam membela kepentingan para petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten/kota.

Asosiasi Komoditas Pertanian dibentuk dengan tujuan untuk: (1) menampung dan menyalurkan aspirasi petani; (2) mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usahatani; (3) memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani; (4) mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri; (5) mendorong persaingan usahatani yang adil; (6) memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan (7) membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusahatani. Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para petani yang telah mengelola usahatani secara intensif, selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal, berbadan hukum dengan susunan, jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis.

Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar Petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Pengorganisasian penumbuhan, pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan Pusat sesuai dengan kewenangannya. Pendanaan pembinaan Kelembagaan Petani dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(Sumber: Permentan No.67 Tahun 2016)

Gambar 8. Mekanisme Fasilitasi Kelembagaan Petani

Salah satu strategi pemantapan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah melalui pemberdayaan petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi Petani (KEP) berbasis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui: a. peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi Petani; b. pemberdayaan Petani melalui pelatihan dan magang di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S; c. penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes); d. pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*); e. pengembangan Kelembagaan Petani dan KEP melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha; f. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian di sentra produksi melalui rembug tani, kursus tani, hari lapang Petani, dan lainnya; g. pengawalan dan pendampingan Penyuluh Pertanian dalam penyusunan RDK dan RDKK; h. peningkatan kemampuan Kelembagaan Petani dan KEP; dan i. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Petani (Poktan, Gapoktan) dan KEP

Menurut Kurnia (2004), korporasi petani adalah sebuah kegiatan penggabungan lahan

usaha tani yang untuk dikelola secara bersama-sama oleh para petani dan terpadu di dalam satu manajemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebersamaan petani menjadi kekuatan dalam pembentukan korporasi. Korporasi petani yang mewujudkan cita-cita petani kecil untuk sejahtera diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Konsep BUMP pada awalnya dicetuskan pada tahun 2009 oleh Pakpahan selaku Deputy Menteri Negara BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan saat itu, beliau mengangkat semangat koperasi dalam pembentukan BUMP karena pada dasarnya badan usaha ini menggunakan asas kepemilikan saham oleh masing-masing petani sehingga terjadi optimalisasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya sosial di perdesaan melalui proses oleh wadah koperasi (Pakpahan, 2010). BUMP ini menjawab kondisi pertanian saat ini yang dianggap tidak menguntungkan dan tidak bernilai harganya. Menurut Pakpahan (2010), kondisi pertanian saat ini ibarat bendungan yang belum memiliki turbin pembangkit listrik sehingga kita hanya memperoleh, misalnya beras dari padi, minyak sawit mentah dari kebun sawit. Padahal potensi untuk menghasilkan energi, pakan ternak, pupuk, papan, dan lainnya sangat besar. BUMP inilah yang akan menjadi turbin pembangkit listrik tersebut sehingga akan menghasilkan hasil lainnya lebih dari apa yang kita nikmati saat ini.

Beberapa daerah di Indonesia kini telah mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Pembentukan BUMP didasari atas keresahan-keresahan petani yang selalu di bawah karena tidak memiliki daya saing dalam memasarkan dan mengembangkan produknya. Keresahan tersebut di wadahi oleh BUMP, dimana petani dibimbing untuk membentuk dan menjalankan badan usahanya secara berkelompok, sehingga keuntungan yang didapatkan bisa digunakan untuk menaikkan taraf hidup petani.

BUMP berbeda dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dilihat dari landasan hukum BUMP yang mengacu dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sedangkan BUMDes berlandaskan UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Terbentuknya BUMDes merupakan suatu kewajiban untuk suatu desa atau dapat dikatakan terbentuknya BUMDesa dalam hal ini secara *Top Down*, sedangkan pembentukannya BUMP secara *Bottom Up*. Hadirnya BUMP sangat menguntungkan dalam hal pemasaran, BUMP salah satu bentuk penyederhanaan perputaran pemasaran hasil pertanian. Faktanya, selama ini perputaran pemasaran hasil pertanian mulai dari panen hingga sampai di tangan konsumen bisa mencapai lima – enam rantai. Hal tersebut sangat berdampak dalam masalah harga semakin

panjang rantai pemasaran, maka semakin tinggi harga hasil pertanian tersebut di tangan konsumen. Dengan adanya BUMP, rantai pemasaran bisa dipangkas dengan cara hasil pertanian langsung ke BUMP. Dimana BUMP telah bekerjasama dengan perusahaan untuk menjalin bisnis. Umumnya BUMP berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga BUMP juga terlindungi oleh UU No. 40 tahun 2007, namun tidak menutup kemungkinan untuk BUMP berbentuk koperasi, semua itu tergantung pada keinginan petani.

Mardikanto (2009) dalam Febrimeli (2021) mengenalkan BUMP sebagai hibrid antara lembaga bisnis dan lembaga pemberdayaan. Hal ini bermakna, BUMP bukan hanya sekadar lembaga bisnis yang profesional, tetapi lebih mengutamakan fungsi pemberdayaan masyarakat, khususnya petani. Dalam prespektif BUMP, bentuk upaya pemberdayaan terbagi menjadi empat “pengembangan kapasitas”, yaitu pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Pengembangan kapasitas manusia berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kemampuan sumberdaya petani, kehadiran BUMP merubah perilaku petani dari petani subsisten kearah petani komersil yang semakin maju. Pengembangan kapasitas usaha berhubungan dengan bagaimana peningkatan kemampuan ekonomi dengan berbagai usaha produktif, dengan hadirnya BUMP bisa memperpendek saluran pemasaran dari setiap hasil pertanian dan pengembangan jejaring dan kemitraan. Pengembangan kapasitas lingkungan mengarah kepada keberlangsungan kondisi sumberdaya alam yang serba terbatas agar terciptanya pertanian berkelanjutan dan terpadu. Pengembangan kapasitas kelembagaan lebih bersinggungan dengan organisasi petani yang mampu menjadi wadah yang dapat mendorong kemandirian dan keberdayaan petani, dengan adanya BUMP akan lebih mengefektifkan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Mengingat kesejahteraan petani merupakan hak yang harus diperoleh oleh petani maka pengembangan kelembagaan ekonomi pertanian adalah salah satu solusi untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut. Dengan adanya kelembagaan seperti BUMP ini, sangat membantu dalam meningkatkan kemandirian serta kualitas sumber daya petani. Dengan meningkatnya kemandirian dan kualitas sumber daya petani maka akan selalu membuatnya *compatible* dengan perkembangan zaman.

5.2.4 Ekosistem Dalam Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika di Kabupaten Dairi

Ekosistem adalah suatu kondisi yang kompleks. Para pelaku dalam satu ekosistem berinteraksi di wilayah geografis tertentu dan perilaku, respons, dan tindakan mereka dipengaruhi oleh serangkaian kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Toutain dan Mueller, 2015).

Tantangan terbesar sektor pertanian merupakan kurangnya minat anak muda untuk berpartisipasi pada ekosistem pertanian. Padahal, partisipasi anak muda diharapkan untuk mendukung keberlanjutan dari sektor pertanian. Perlu membentuk ekosistem dari hulu hingga hilir yang punya bisnis profit yang melibatkan banyak sekali *skill set* serta *knowledge* yang akhirnya tidak hanya membangun *business impact*, namun pula *social impact* (Sanyoto, 2022). Menurut Nashwari (2023) dalam Hidayat (2023) mengemukakan bahwa ekosistem Pertanian terdiri dari subsistem hulu, pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya, diperlukan peran multipihak seperti penyuluh, pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana seperti alat mesin pertanian dan pembiayaan dari pihak perbankan.

Saat ini, bentuk peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi adalah memfasilitasi pada subsistem hulu dengan menyalurkan bantuan pupuk bersubsidi, bibit gratis dan pendampingan kelompok tani. Gerakan Rabu Ngopi di Kota Kopi dilakukan untuk membangun budaya dan citra positif produk kopi yang dihasilkan oleh para petani kopi di Kabupaten Dairi. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Dairi bersama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi. Kegiatan ini dilakukan setiap Hari Rabu dengan lokasi yang berbeda-beda sesuai agenda kegiatan di masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya, pihak non pemerintahan yakni HRNS memberikan edukasi dan penguatan kelompok melalui pendampingan dan ToT GAP Kopi Arabika kepada penyuluh dan tenaga swadaya sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan kepada para petani kopi arabika di Kabupaten Dairi. PT. Wahana memberikan kontribusi pada subsistem pengolahan dan pemasaran produk kopi yang dihasilkan petani. Permodalan usaha tani kopi arabika difasilitasi dengan KUR (seperti Bank Sumut dan BRI).

BAB VI.

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kondisi kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi dapat diklasifikasikan dalam empat aspek, yaitu: (1) sumber daya manusia (SDM) petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (2) budidaya tanaman kopi arabika di Kabupaten Dairi, (3) kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi, (4) ekosistem dalam pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Aspek sumber daya manusia (SDM) petani mayoritas belum memiliki kemampuan budidaya tanaman yang baik (*Good Agriculture Practices*) dan penanganan pascapanen yang baik (*Good Handling Practices*). Namun terdapat para tokoh petani lokal yang telah berhasil (*local champion*) yang dapat berperan untuk membantu proses peningkatan kapasitas SDM petani kopi arabika di Kabupaten Dairi. Aspek budidaya tanaman yang baik yang dilakukan oleh petani mayoritas belum sesuai anjuran GAP. Hal ini disebabkan karena pola pikir (*mindset*) pemahaman yang keliru tentang GAP kopi arabika. Aspek kelembagaan petani kopi arabika di Kabupaten Dairi masih bergerak sebagian kecil yang dapat mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi. Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Sumatera Sidikalang (LMPIG KASS) belum berjalan sesuai fungsinya dalam memberikan edukasi, pengolahan dan pengawasan serta pemasaran kopi arabika petani di Kabupaten Dairi. Aspek ekosistem agribisnis kopi arabika sudah mulai terbentuk dan berperan dari masing-masing subsistem agribisnis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Dairi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang kondisi kelembagaan petani kopi arabika dalam mendukung pengembangan agribisnis kopi arabika di Kabupaten Dairi saat ini, dapat disarankan sebagai berikut: (1) Perlu pemetaan SDM para lokal champion pada masing-masing desa dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi dapat melibatkan peran aktif para local champion untuk meningkatkan kapasitas SDM petani kopi arabika; (2) Dalam penerapan GAP kopi arabika, diperlukan pendampingan yang intensif pada kelompok tani komoditi kopi arabika; (3) LMPIG KASS harus bisa bergerak sebagai katalisator pengembangan agribisnis kopi arabika di

Kabupaten Dairi; (4) ekosistem agribisnis perlu diperkuat bentuk komitmen, peran dan kontribusinya supaya dapat saling mendukung antar multipihak dalam elemen ekosistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa Daily, 2017. Kementan Beri Penghargaan Produksi Kopi Arabika Sumut. <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/10/3/425913/kementan-beri-penghargaan-produksi-kopi-arabika-sumut/> diakses pada Tanggal 20 Januari 2021.
- Apsari, N. Cipta, dkk., 2017. Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Penguatan Kapasitas Dalam Pengolahan Hasil Kopi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Prodising Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14346/6926>(diakses pada Tanggal 18 Februari 2021).
- Ariyanto, Sukardi, 2017. Agroforestri Berbasis Kopi. Bahan bacaan bagi peserta Training of Trainer (ToT) Budidaya Kopi Arabika Gayo secara Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo bekerja sama dengan Canada – Indonesia Trade Private Sector Assistant Project (TPSA) dan Kebun Percobaan (KP) Gayo - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh, 6-8 Maret 2017.
- Azwar, S., 2011, *Realibilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2011, *Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2019. Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Kopi Arabika Perkebunan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo Tahun 2019. <https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/11/666/luas-tanaman-dan-produksi-kopi-arabika-tanaman-perkebunan-rakyat-menurut-kabupaten-kota-2015.html> diakses pada Tanggal 8 Februari 2021.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, 2019. Statistik Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. <http://disbun.sumutprov.go.id/statistik/web/index.php?r=site%2Fgrafik&tahun=2020&komoditas=3> (diakses pada Tanggal 18 Februari 2021).
- Ife, J. dan F. Tesoriero, 2013, *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laksana, N. Septyasa, 2013. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1 No.1, Januari 2013.
- Laksono, Bayu Adi, 2017. *The Community Empowerment Through Social and Educational Institutions*. Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Universitas Negeri Malang.
- Kusnandy, Rosana Nabila. 2021. Definisi Sumber Daya Manusia Menurut Para Ahli. Learning Managemen System (LMS) SPADA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=6356> pada Tanggal 10 November 2023.
- Kusniawati, D., 2017. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji. Jurnal Sosioglobal; Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Volume 2 No.1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/15282> diakses pada Tanggal 22 Februari 2021
- Nawawi, Hadari, 2003. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardikanto, T., 2014, Penyuluhan Pembangunan Pertanian, Edisi revisi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Supriadi, H. dan Pranowo, B. 2015. Prospek pengembangan agroforestri berbasis kopi di Indonesia. *Perspektif* 14 (2): 135 -150
- Rivai, Veithzal, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Heru, dkk, 2013. Analisis Permintaan dan Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Di Indonesia. *Jurnal Agrise* Volume VIII No.1 Bulan Januari 2013. ISSN: 1412-1425.
- Sanyoto, Deeng, 2022. Ekosistem Pertanian. Workshop Badan Pengelola Dana Pendidikan Kelapa Sawit (BPDPKS). Jakarta. Diakses dari <https://agribisnis.uma.ac.id/2022/03/02/ekosistem-pertanian/> pada Tanggal 23 Desember 2023.
- Saragih, B., 2018. Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: CV. Alfabeta.
- Widjajanti, Kesi, 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, Hal. 15-27.

<http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/202/189> diakses pada Tanggal 23 Februari 2021.

Wimatsari, Ani Dwi dkk., 2019. Sikap Pemuda Desa Terhadap Usaha Tani Salak Organik dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berusahatani Salak Organik. *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, Volume 5 No.1, Januari – Juni 2019.